

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI INDONESIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1).
- Ayem, Sri dan Dessy Dyah Pratama. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol.2 No.2. p-ISSN: 2550-0376 /e-ISSN: 2549-9637
- Ayinde, Kayode., Kuranga, John., and Rukman., Adewale F. 2015. Modelling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-integration, Error Connection Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), pp: 858-867.
- Boediono. 2010. *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Ginting, Rahmi. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Riau*. Vol. 4 No. 2.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Alih Bahasa: D. Guritno). Jakarta: Rajawali Pers.

Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali, *Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 1255-1281

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kusnandar, D. (2012). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Universitas Indonesia. Jakarta

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mudrajat Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). Dasar-Dasar Statstik Penelitian.

Nurdiwaty, Diah dkk. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.17 No. 1 ISSN: p-1411-4054/e-ISSN: 2579-3217

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2015 *Tentang Klasifikasi Anggaran*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 33 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.*

Permana, D dan Rahardjo. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.2 No.4. 2337-3806

Putra, F. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol.5 No.1. 2933-2053

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang No.54 Tahun 2017 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*

- Santika Rahayu. 2019 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2017)*. Skripsi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta.
- Siswiyanti, Pungki. (2015).Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.*Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*. Vol.7 No.1. e-ISSN: 2502-6380
- Sudika, I komang dan I Ketut Budiarta. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21 No.2. 1689-1718
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, B. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.*Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.2 No. 1. 2339-1545
- Utami, E. S. (2015). PENGARUH PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013. *Jurnal SosioHumaniora*, 6(1).